



Koordinasi Inspektorat-BPK Harus Dibangun

SKPD Diharapkan Kelola Keuangan dengan Baik

SINTANG-Bupati Sintang, Jarot Winarno mengharapkan antara Inspektorat, SKPD dan BPK bisa bersinergi dalam membantu tata kelola keuangan yang baik, agar bisa terwujudnya masyarakat Sintang yang cerdas, berkualitas dan bersih.

Hal demikian dikemukakan bupati saat pertemuan antara BPK-RI dengan SKPD Sintang, belum lama ini. "Koordinasi dengan



Jarot Winarno

BPK harus dimanfaatkan baik, supaya membuat kita semua paham dengan tata cara kelola keuangan yang baik," kata Jarot.

Kemudian Wakil Bupati Sintang, Askiman mengucapkan terimakasih kepada BPK telah memberikan tiga tahun kepada Kabupaten Sintang untuk mendapatkan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ia juga mengatakan, langkah kedepan tata kelola

keuangan administrasi akan diperketat mulai dari penjagaan dan monitoring mulai dari saat pelaksanaan, proses pelaksanaan dan hasil pelaksanaan haruslah diawasi.

"Kedepan bukan hanya tata kelola administrasi yang dipantau tetapi tata kelola di lapangan harus baik, agar bersinergi dan mendapatkan hasil yang terbaik," katanya.

Askiman menambahkan, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menanggapi hal tata kelola keuangan, harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dimana

◆ Ke Halaman 27 kolom 5

Koordinasi Inspektorat-BPK Harus Dibangun

Sambungan dari Halaman 28

pengendalian tata cara mengelola keuangan yang baik, diharapkan SKPD agar membuat desain perencanaan berdasarkan taat asas dan gunakan standar yang tepat. "Tata kelola keuangan haruslah berencana, dalam tata kelola keuangan

haruslah benar-benar diperhatikan," kata Askiman. Ketua Tim BPK-RI Perwakilan Kalbar mengatakan, pengelolaan tata keuangan haruslah baik lagi. Mohon dukungan kepada seluruh SKPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk memberikan dan menata keuangan dengan

baik, sehingga bisa lebih mudah dilihat. Sementara kaitan dengan pemeriksaan peranan BPK adalah untuk memeriksa kerugian Negara yang dilakukan SKPD serta memberikan instruksi bagaimana tata cara mengelola keuangan yang baik dan benar agar tidak ada kerugian negara. (stm)